

Urgensi Transformasi Kurikulum Berbasis *Artificial Intelligence* Bagi Siswa Di Daerah Kantong Pekerja Migran Indonesia Menuju *Zero Skill Mismatch*

Fithriatus Shalihah¹, Haura Salsabiela El Sabrina Nazar², Lubna Aqiela Nazar³

Abstract

Gaps in the protection of Indonesian migrant workers (PMI) in the pre-placement period. The fact that prospective migrant workers are increasing every year but are not supported by adequate and appropriate skills (Skill-Mismatch). The author has identified 6 factors that cause the ineffective protection of migrant workers that are not prepared to be strengthened during the pre-placement period, including: 1) Problem mindset 2) Discussion and communication obstacles 3) Mentality 4) Lack of understanding of labor law 5) Lack of cultural information about the country of placement and 6) Lack of financial and entrepreneurial literacy. The urgency of strengthening skills for CPMI students as ordered by the PMI Protection Law Number 18 of 2017 is important considering that the implementation of job training by the government through digital services or through government partners is currently not effective. Therefore, curriculum policy innovation is needed for CPMI students so that the above problems can be overcome as early as possible through learning according to skill needs so that CPMI students can receive longer, continuous and programmatic debriefing. This paper examines the gap in the protection of CPMI students during the pre-placement period and contributes thoughts related to the transformation of the AI- based curriculum towards zero skill-mismatch. This research method uses a type of normative law using a legislative approach and theories or expert opinions that are conceptual in nature that are integrated-interconnected. This paper explains that AI- based curriculum transformation requires multistakeholder collaboration. With an adaptive and predictive approach, AI can be a means of supporting skill strengthening for CPMI, in this case CPMI students in PMI enclaves in Indonesia.

Keywords: *Artificial Intelligence, PMI Enclaves, Indonesian Migrant Workers, Curriculum Transformation, Zero Skill Mismatch.*

Abstrak

Kesenjangan dalam pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) masa pra-penempatan. Fakta calon PMI yang setiap tahun meningkat namun tidak ditunjang dengan keterampilan yang memadai dan berkesesuaian (Skill-Mismatch). Penulis telah mengidentifikasi 6 faktor penyebab belum efektifnya perlindungan PMI yang tidak dipersiapkan penguatannya pada masa pra-penempatan, diantaranya: 1) Problem mindset 2) Kendala bahas dan komunikasi 3) Mentalitas 4) Minimnya pemahaman hukum ketenagakerjaan 5) Minimnya informasi budaya/culture negara penempatan dan 6) Minimnya literasi keuangan dan entrepreneur. Urgensi penguatan skill bagi siswa CPMI sebagaimana diperintahkan UU Pelindungan PMI Nomor 18 Tahun 2017 penting mengingat penerapan pelatihan kerja oleh pemerintah melalui layanan digital atau melalui mitra pemerintah saat ini belum efektif. Sehingga diperlukan inovasi kebijakan kurikulum bagi siswa CPMI supaya masalah diatas dapat diatasi sedini mungkin melalui pembelajaran sesuai kebutuhan skill agar siswa CPMI dapat menerima pembekalan lebih lama, berkesinambungan dan terprogram. Tulisan ini menelaah kesenjangan dalam pelindungan siswa CPMI pada masa pra penempatan dan memberikan kontribusi pemikiran terkait transformasi kurikulum berbasis AI menuju zero skill-mismatch. Metode penelitian ini menggunakan jenis hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan teori-teori atau pendapat ahli yang sifatnya konseptual yang terintegrasi-terinterkoneksi. Tulisan ini menjelaskan bahwa transformasi kurikulum berbasis AI memerlukan kolaborasi multistakeholder. Dengan pendekatan adaptif dan prediktif, AI bisa menjadi sarana pendukung penguatan skill bagi CPMI dalam hal ini para siswa CPMI pada daerah kantong PMI di Indonesia.

Kata kunci: *Artificial Intelligence, Daerah Kantong PMI, Pekerja Migran Indonesia, Transformasi Kurikulum, Zero Skill Mismatch.*

¹ Fithriatus Shalihah, Program Studi Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan, email: fithriatus.shalihah@law.uad.ac.id

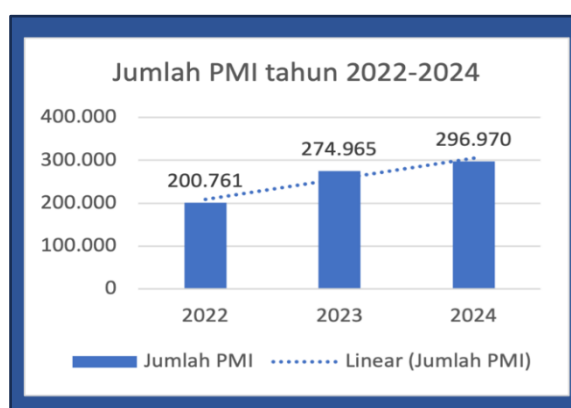
² Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga

³ Lubna Aqiela Nazar, Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Pendahuluan

Aksesibilitas pekerjaan masih menjadi masalah utama di Indonesia, dimana jumlah angkatan kerja jauh melebihi ketersediaan lapangan pekerjaan.⁴ Laporan Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan angkatan kerja Indonesia berjumlah 152.107.603, naik 4.400.151 jiwa dibanding tahun sebelumnya.⁵ Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan rendahnya penyerapan tenaga kerja, berujung pada meningkatnya angka pengangguran.⁶ Tahun 2024, jumlah pengangguran sebanyak 7.47 juta jiwa.⁷ Tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya lapangan pekerjaan dan upah yang tidak kompetitif menjadi faktor pendorong untuk mencari alternatif pekerjaan di luar negeri.⁸ Data BP2MI menunjukkan peningkatan signifikan keberangkatan CPMI dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:⁹

Gambar 1.
Data peningkatan jumlah PMI 3 2022-2024



Keberangkatan PMI menjadi solusi dalam mengatasi pengangguran serta efektif mendorong pertumbuhan ekonomi,¹⁰ sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas

⁴ Melisa Marty Ompi, "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," *Lex Priv*, vol. 12, no. 2, 2023, hlm 1.; Hendra Wijayanto & Samsul Ode, "Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran di Indonesia," *Administratio*. Vol 10 No. 1, 2019, hlm 2.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024," *Badan Pus. Stat.*, vol. 11, no. 83, pp. 1–28, 2024.; Badan Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*, 2023.

⁶ Afifah Rizkia & Ria Haryatiningsih, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Kota Besar di Pulau Jawa," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3 No 2, Desember 2023, hlm 127.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia*, vol. 46, no. 2. 2024.

⁸ Zulfan Fikriansyah and Aan Julia, "Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus: di Desa Bongas Kecamatan Bogas Kabupaten Indramayu)," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2023, hlm 28.; Reddy Anggara, dkk. "Understanding the motivations of being Indonesian migrant workers," *Cogent Social Sciences*, Vol. 10 No. 1, 2024, hlm 2.

⁹ BP2MI, *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Tahun 2022*, Pusat Data dan Informasi, 2022.; BP2MI, *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Tahun 2022*, Pusat Data dan Informasi, 2023.; Data Indonesia id, *Kumpulan Data Pekerja Migran Indonesia pada 2024*, *DataIndonesia*, 2024.

¹⁰ Hai Hien Huynh and Duc Hong Vo, "The Effects of Migration on Unemployment: New Evidence from the Asian Countries," *Sustainability* Vol. 15, No. 14, 2023, hlm 7. ; Ajeng Tiara Bangsa Rahmawati, dkk, "Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemberangkatan PMI Di Masa Pandemi)," *Journal of International Relations Diponegoro*, Vol. 9 No 1, 2023, hlm 373. ; Hidayat, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Ilmu*

pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di sisi lain, PMI berkontribusi sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas.¹¹ Namun, di balik peran strategis tersebut bekerja di luar negeri memberikan tantangan besar bagi PMI,¹² karena harus berhadapan dengan budaya kerja, bahasa, iklim dan kebiasaan masyarakat yang berbeda di negara penempatan, hal ini sering kali menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan dalam lingkungan kerja. Diantara sumber masalah yang dihadapi PMI adalah kurangnya keterampilan dan perilaku yang tidak profesional,¹³ hal tersebut menunjukkan fakta masih banyaknya PMI yang bekerja namun tidak memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memenuhi standar bekerja. Daerah kantong PMI yang menjadi sumber utama pengiriman PMI setiap tahun meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung dan NTB.¹⁴ Berdasarkan jenis pekerjaannya, mayoritas PMI terkonsentrasi disektor informal,¹⁵ disebabkan oleh keterbatasan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja disebabkan oleh kualifikasi tingkat pendidikan.¹⁶ Mayoritas PMI berpendidikan terakhir SMP/SMA, sehingga keterampilan dan kompetensi yang dimiliki cenderung terbatas.¹⁷

Fakta bahwa jumlah Calon PMI (CPMI) terus meningkat setiap tahunnya, namun belum diimbangi dengan kesiapan keterampilan yang memadai dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja global, mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*). Fenomena ini secara umum disebabkan oleh 6 faktor yaitu: 1) *problem mindset*, 2) kendala bahasa dan teknik komunikasi, 3) mentalitas, 4) minimnya pemahaman hukum ketenagakerjaan, 5) minimnya informasi budaya negara tujuan penempatan dan 6) Minimnya literasi *entrepreneur* dan keuangan. Kondisi ini diperburuk oleh adanya stigma dimasyarakat daerah kantong PMI, bahwa setelah lulus SMA langkah praktis memperoleh penghasilan besar adalah bekerja di luar negeri,¹⁸ yang pada praktiknya ditempuh melalui jalur legal maupun illegal. Hal ini semakin diperkuat oleh lemahnya sistem pendidikan nasional, di

Hukum, Vol. 10 No. 1, 2021, hlm 73. ; Andhika Djalul Sembada, dkk “Motivasi Calon Pekerja Migran Indonesia Bekerja ke Luar Negeri dan Kontribusinya Bagi Negara Indonesia,” *Metta Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 4 No 2, 2024, hlm 52.

¹¹ Septi Hariani and Najamudin Khairur Rijal, “Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan Zero Unprocedural PMI,” *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Vol 3 No 1, 2023, hlm 2.

¹² Fithriatus Shalihah & Siti Alviah, “Examining the Role of BPJS Employment Indonesia in Ensuring Social Security for Migrant Workers in HongKong,” *JILS (Journal Of Indonesian Legal Studies)*, Vol 8, No 2, 2023, hlm 1202.

¹³ Desi Fitriani, dkk, “Strategi Peningkatan Kompetensi Calon pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol 49 No 2, 2023, hlm 192.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, Cerita Data Statistik Untuk Indonesia “Pekerjam Igran Indonesia”, Vol 1 No 4, 2024, hlm 10.

¹⁵ Cindiana, Merlin, dkk. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Anak Pekerja Migran Indonesia untuk Bekerja ke Luar Negeri di Kabupaten Cilacap,” *Journal Economic Business*, Vol 6 No 1, 2022, hlm 2; Lara Indah Yandri and Geraldly Pratama Putra, “Strategi dan Kebijakan dalam Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI),” *Menara Ilmu*, Vol. XVII, No. 1, 2023, hlm 64.

¹⁶ Resta Ayu Susanita and Lilia Pasca Riani, “Pendidikan Sebagai Kunci Utama Dalam Mempersiapkan Generasi Muda Ke Dunia Kerja Di Era Globalisasi,” *Prosiding Pendidikan Ekonomi*, 2024, hlm 8.

¹⁷ Azizah Kholifatul Nisa, dkk. “Hubungan Usia, Tingkat Pendidikan & Status Perkawinan dengan Partisipasi Perempuan Menjadi Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong di Kecamatan Sukun Kota Malang,” *J. Ketenagakerjaan*, vol. 18, no. 3, pp. 278–291, 2023, hlm 285; Absori, dkk “Penyuluhan tentang Problematika dan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Hongkong,” *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm 232.

¹⁸ Novitasari, “Pengambilan Keputusan Perempuan Menjadi Buruh Migran Indonesia (Studi Kasus Di Desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang,” *Prosiding Seminar Nasional. Riset Teknologi Terapan*, 2020, hlm 4.; Saipul Hamdi, dkk. “Strategi Survival Pekerja Migran di Masa Pandemi Covid-19 di Suralaga, Lombok Timur,” *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora.*, vol. 8, no. 2, 2022, hlm 245.

mana faktanya kurikulum pendidikan di Indonesia seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan industri,¹⁹ sehingga lulusan tidak siap bersaing di pasar kerja, baik dalam maupun luar negeri.

Tuntutan teknologi dan perubahan tren bisnis membuat kebutuhan *skill* di dunia kerja berubah dengan cepat, sementara sistem pendidikan belum cukup responsif mengikutinya, sehingga berdampak pada maraknya fenomena *skill mismatch*. Fenomena *skill mismatch* yang dialami PMI rentan menimbulkan eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak aman.²⁰ Di era *society 5.0*, AI hadir dengan potensi besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan termasuk pada bidang pendidikan,²¹ penggunaan AI dalam pembelajaran sangat relevan diterapkan, transformasi kebijakan kurikulum berbasis AI memungkinkan siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih realistis. Akses global dan kemudahan yang ditawarkan AI dapat memberikan keterampilan praktis untuk menghindari CPMI berangkat ke negara tujuan dengan *skill mismatch*.

Dari enam kendala yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa di antaranya tergolong sangat mendesak, namun sebenarnya bisa diatasi sejak awal melalui penguatan tertentu. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan sejak dini adalah kesiapan keterampilan, seperti penguasaan bahasa sebagai alat komunikasi utama di negara tujuan, pemahaman budaya setempat, hukum ketenagakerjaan, serta literasi yang memadai. Tulisan ini secara khusus menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan komunikasi, terutama penguasaan bahasa asing sesuai negara tujuan. Hal ini tidak bisa dilakukan secara instan menjelang keberangkatan, melainkan harus dimulai sejak Calon PMI (CPMI) masih berstatus sebagai pelajar. Upaya ini terutama penting bagi para siswa di wilayah kantong PMI di Indonesia, yang umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan lebih memilih langsung bekerja sebagai PMI setelah lulus sekolah. Transformasi kurikulum berbasis AI ini menjadi bagian dari upaya perlindungan PMI sebagaimana diamanatkan dalam UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan selaras dengan tujuan Asta Cita pemerintahan yakni meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan memperkuat pengembangan SDM yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's). Penelitian serupa juga telah dilakukan pada siswa menengah atas di daerah kantong PMI terbesar, yakni NTB.²² Tulisan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pengembangan kurikulum sekolah yang lebih inovatif dan efektif berbasis AI dalam mempersiapkan siswa CPMI yang siap kerja.

¹⁹ Sarah NurHalizah, "Kesenjangan Kurikulum Smk Dengan Kebutuhan Industri," *Adiba J. Educ.*, vol. 4, no. 2, pp. 227–233, 2024.

²⁰ Fithriatus Shalihah & Muhammad Nur, "Human Rights Violation Againsts the Indonesian Migrant Fisheries Crew in Chinese-Flagged Long Xing Vessel", *mabal*, Vol 10, No: 1, 2021, hlm 71; Desi Fitriani, dkk, "Strategi Peningkatan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol 49, No. 2, 2024, hlm 191

²¹ Tri Kristianti, "Implementasi Artificial Intelegence (Ai) Dalam Dunia Pendidikan Di Era Society 5.0," *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Guru XV*, Vol. 15 No. 1, 2023, hlm 148; Bambang Karyadi, "Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Mendukung Pembelajaran Mandiri," *Educate Jurnal Teknologi Pendidikan.*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm 256.; Ade Arya Bimantara, dkk "Dampak dari Kecerdasan Buatan yang Mulai Menyebarkan Segala Bidang Terutama dalam Bidang Pendidikan Terhadap Pencapaian Pelajar," *Abdi Jurnal* vol. 5, no. 1, 2024, hlm 14.

²² Khairina Rohmatin, dkk. "Komparasi Pemenuhan HAM Bagi PMI Asal Pulau Lombok di Tiga Negara Tujuan Utama (Arab Saudi, Malaysia dan Singapura)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2, pp. 239–256, 2024.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah ini adalah bagaimana kesenjangan dalam pelindungan PMI pada masa pra penempatan khususnya bagi siswa CPMI di daerah kantong PMI dan bagaimana urgensi transformasi kurikulum berbasis *Artificial Intelligence* bagi siswa di daerah kantong pekerja migran Indonesia menuju *Zero Skill Mismatch*?

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan kajian dari hasil penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan hukum, konseptual, hukum perbandingan, dan kajian pustaka sistematis. Sehingga tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan teori-teori atau pendapat ahli yang sifatnya konseptual yang terintegrasi terinterkoneksi. Kajian pustaka sistematis merupakan pendekatan yang melibatkan penelitian dan analisis terhadap kumpulan pustaka yang relevan, seperti jurnal yang telah dipublikasikan sebelumnya, dengan fokus pada teori yang dibahas dalam ruang lingkup tertentu. Berbagai metodologi digunakan, meliputi pendekatan hukum, konseptual, kasus, analitis, dan filosofis. Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen sebagai strategi pengumpulan data yang dipilih. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari studi pustaka. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan hasil penelitian. Serta mengkaji lebih lanjut bahan hukum primer pada tataran teoritis dan penerapannya secara relevan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesenjangan Dalam Pelindungan PMI Pada Masa Pra Penempatan Khususnya Bagi Siswa CPMI Di Daerah Kantong PMI

Daerah kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan wilayah-wilayah yang secara historis dan struktural telah menjadi sumber utama pengiriman tenaga kerja migran ke luar negeri. Wilayah-wilayah ini biasanya ditandai oleh kondisi sosial ekonomi yang terbatas, tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya pendidikan masyarakat, serta kurangnya lapangan pekerjaan lokal yang layak.²³ Akibatnya, migrasi ke luar negeri menjadi pilihan rasional yang dianggap mampu memperbaiki taraf hidup.

Setiap tahunnya, jumlah keberangkatan PMI secara nasional menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lima provinsi terbesar pengirim PMI adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung dan NTB.²⁴ Kelima daerah ini dikenal sebagai kantong migran karena secara konsisten menjadi penyumbang terbesar PMI di berbagai sektor, terutama sektor informal seperti rumah tangga,

²³ Deina Asri Erawati, dkk, "Dampak Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Desa Lepak, Kabupaten Lombok Timur", *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, Vol 1, No: 2, 2023, Hlm. 173

²⁴ Badan Pusat Statistik, Cerita Data Statistik Untuk Indonesia "Pekerjam Igran Indonesia", Vol 1 No 4, 2024, hlm 10

pertanian, dan konstruksi di negara-negara tujuan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tentu menuntut pemahaman dan keterampilan.

Yang menjadi perhatian serius adalah profil pendidikan para PMI tersebut. Mayoritas dari mereka yang bekerja ke luar negeri merupakan lulusan jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA/SMK).²⁵ BPS dan BP2MI (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 80% PMI hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat SMA atau lebih rendah, dan sangat sedikit yang memiliki sertifikasi keahlian atau keterampilan khusus. Hal ini menandakan bahwa pendidikan formal bagi sebagian besar PMI bukanlah media untuk meningkatkan daya saing kerja, melainkan sebatas formalitas administratif untuk memenuhi syarat usia kerja atau syarat keberangkatan ke luar negeri.

Kondisi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa belum semua sekolah di daerah kantong PMI fokus pada pengembangan keterampilan siswanya. Banyak sekolah yang belum mengalami transformasi teknologi secara menyeluruh.²⁶ Akibatnya, lulusan dari sekolah-sekolah di Kantong PMI tersebut tidak memiliki bekal yang cukup dan keterampilan yang memadai sehingga berdampak pada terjadinya kseanangan kompetensi (*Skill gap*) yang berujung pada terjadinya *skill mismatch*.

Skill Mismatch adalah kondisi di mana kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja.²⁷ Dalam konteks migrasi tenaga kerja, *skill mismatch* menjadi isu yang krusial. Banyak calon PMI menghadapi tantangan karena keterampilan yang mereka miliki tidak sesuai dengan standar atau kebutuhan pasar kerja di negara tujuan. Oleh karena itu, yang terjadi selama ini sebagai bentuk perlindungan pra penempatan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap calon pekerja migran wajib mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.²⁸ Langkah ini bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan yang relevan, meningkatkan daya saing, serta meminimalisasi risiko eksploitasi dan kegagalan dalam penempatan kerja di luar negeri.

Namun, pelatihan kerja yang diberikan sering kali belum mampu menjamin penguasaan keterampilan yang memadai bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kasus pemalsuan dokumen oleh pekerja migran masih sering terjadi, dan banyak dari mereka tidak mendapatkan pelatihan sebelum diberangkatkan.²⁹ Selain itu, diskursus mengenai pelindungan PMI pada masa pra

²⁵ Azizah Kholifatul Nisa, dkk. "Hubungan Usia, Tingkat Pendidikan & Status Perkawinan dengan Partisipasi Perempuan Menjadi Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong di Kecamatan Sukun Kota Malang," *J. Ketenagakerjaan*, vol. 18, no. 3, pp. 278–291, 2023, hlm 285; Absori, dkk "Penyuluhan tentang Problematika dan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Hongkong," *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm 232.

²⁶ Mochamad Nashrullah, dkk, "Transformasi Digital Dalam Pendidikan Indonesia: Analisis Kebijakan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pembelajaran", *Mudir*, Vol 7, No. 1, 2025, Hlm. 54

²⁷ Argi Yhudin Avri Ardhana, dkk, "Analisis Ketidakesesuaian antara Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja di Indonesia", *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol 3, No: 4, 2025, Hlm. 1023

²⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 6 ayat (1)

²⁹ Fathiah, dkk. "Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Negara Penempatan Malaysia untuk Peningkatan Kapasitas dan Persiapan Kemandirian" *Jurnal Kreasi*, Vol. 3 No 3, 2023, hlm 216; Sri Rahmany, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga", *Iqtishaduna*, Vol 7, No:1, 208, hlm 67.

penempatan menunjukkan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam pelaksanaan pelatihan konvensional, diantaranya: ³⁰

Gambar 2.
Faktor Keterbatasan Pelatihan



Tingginya biaya pelatihan, waktu pelatihan, dan gagalnya pendekatan *one-size-fits* dalam menjawab variasi kebutuhan individu menjadi faktor-faktor keterbatasan pada pelatihan konvensional. Terbatasnya waktu yang diberikan pada pelatihan konvensional tanpa adanya dasar pemahaman dan skill sejak semasa sekolah, hasil yang diperoleh siswa CPMI cenderung kurang maksimal. Akibatnya, pelatihan tersebut cenderung hanya menjadi formalitas untuk memenuhi syarat administratif keberangkatan, bukan sebagai upaya nyata peningkatan kompetensi.³¹ Ketidaksiapan skill PMI dalam menghadapi dunia kerja internasional pada penelitian sebelumnya, terlihat dari berbagai factor diantaranya masih banyaknya PMI yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka pada saat bekerja,³² masih banyak yang belum memiliki kemampuan bahas asing yang baik serta keterampilan bekerja yang memadai.³³ Bahkan beberapa penelitian lainnya menunjukkan banyak diantara PMI yang berangkat secara *unprosedural* atau ilegal tanpa dokumen.³⁴

Kepergian Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa persiapan keterampilan yang memadai dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja global menciptakan *skill mismatch*.

³⁰ D. A. L. Gaol, Agusmidah, and F. Shalihah, "Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pembebasan Biaya Penempatan," *Prosiding Konferensi Ke-4 Perkumpulan Pengajar dan Prakt. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Vol. 4, pp. 36–57, 2022.; Imanuel Setyo Budi, dkk. "Peran Dan Tantangan Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Inovasi Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Indonesia Masa Depan," *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 4 No. 4, pp. 1188–1194, 2024, hlm 1192.

³¹ Sri Rahmany, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga", *Iqtishaduna*, Vol 7, No : 1, 208, hlm 67.

³² Suwarti Sari, dkk, "Pelatihan Persiapan Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum Penempatan hingga Pemulangan di Desa Nanggalamekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat", *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, Vol 1, No: 2, 2020, hlm. 148.

³³ Ridwandani Azril Nurachmat, dkk, "Pengawasan BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dalam Upaya Mewujudkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang Bermartabat", *Lentera: Multidisciplinary Studies*, Vol 3, No: 2, 2025, hlm.178.

³⁴ Kholidazia El Hamzah Fathullah, dkk, "Modus Dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Ilegal Di Kabupaten Lumajang", *Justness*, Vol 3, No: 2, 2023, hlm. 8

Ketidaksesuaian ini berpotensi memicu berbagai masalah serius, mulai dari rendahnya produktivitas dan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja, hingga masalah yang lebih berat seperti eksploitasi dan kekerasan fisik.³⁵ Jika ketidaksesuaian keterampilan ini tidak ditangani dengan serius, maka hal serupa akan terus menjadi cerita berlanjut yang semakin memperburuk kondisi hidup PMI, memperpanjang ketergantungan mereka, dan meningkatkan kerentanannya terhadap perlakuan tidak manusiawi.

Penulis telah mengidentifikasi faktor yang melatar belakangi terjadinya fenomena tersebut ke dalam 6 kategori, yaitu: pertama, problem *mindset*. Banyak calon PMI berangkat dengan pola pikir yang keliru, seperti anggapan bahwa bekerja di luar negeri otomatis akan membawa kemakmuran. Pandangan ini seringkali membuat mereka mengabaikan pentingnya persiapan keterampilan, memahami budaya dan risiko kerja, dan meremehkan pentingnya pelatihan sehingga berdampak pada munculnya berbagai persoalan ketika bekerja di luar negeri.³⁶ Kedua, kendala bahasa dan teknik komunikasi. Kemampuan berbahasa asing dan keterampilan komunikasi yang tidak efektif masih menjadi kendala utama.³⁷ PMI yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik berdampak pada sulitnya memahami instruksi kerja, tidak bisa menyampaikan keluhan atau kebutuhan mereka, serta kesulitan membangun hubungan profesional. Ini dapat menimbulkan konflik, salah paham, atau bahkan menjadi pemicu kekerasan.

Ketiga, mentalitas. Sebagian PMI belum memiliki kedewasaan emosional dan mental kerja di dunia kerja internasional. Misalnya, kurang disiplin, cepat menyerah saat menghadapi tekanan, atau tidak memiliki tanggung jawab profesional yang kuat. Mentalitas seperti ini membuat mereka sulit beradaptasi dengan ritme kerja, aturan, dan budaya kerja yang berbeda dengan di tanah air.³⁸ Keempat, minimnya pemahaman hukum ketenagakerjaan. Banyak PMI tidak memahami hak dan kewajibannya berdasarkan hukum ketenagakerjaan baik di Indonesia maupun di negara tujuan.³⁹ Hal ini menyebabkan mereka tidak menyadari saat hak-haknya dilanggar, tidak tahu cara mencari perlindungan, atau malah melanggar hukum di negara tujuan. Minimnya pemahaman ini membuat PMI lebih rentan terhadap pelanggaran kontrak, eksploitasi, hingga kriminalisasi.

Kelima, minimnya informasi budaya negara tujuan penempatan. PMI yang tidak dibekali informasi tentang budaya, norma sosial, dan kebiasaan masyarakat negara tujuan akan mengalami gegar budaya (*culture shock*). Mereka bisa dianggap tidak sopan, kasar, atau tidak profesional karena tanpa sengaja melanggar norma lokal. Kurangnya pemahaman

³⁵ Grace Nevla & Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa, "Strategies For Preventing Exploitation of Non-Procedural Indonesian Migrant Workers (PMI) Based On Routine Activity Theory", Vol. 4, No. 4, May2024, hlm 631.

³⁶ Agusmidah, Asri Wijayanti, Fithriatus Shalihah, Dios Aristo Lumbangaol, & Reinaldo "The financial protection of Indonesian migrant workers and its economic consequences", *Economic Annals-XXI*, Vol 196 Issue (3-4),2022, hlm 24

³⁷ Royani Afriani, dkk, "Penguatan Keterampilan Bahasa Inggris Pekerja Migran Indonesia (PMI) Cirebon", *Equalita*, Vol 2, No: 1, 2020, hlm. 95.

³⁸ Nana Kariada Tri Martuti, dkk, "Pojok Curhat" Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan Sebagai Sarana Penguatan Mental di Negara Asing", *Bernas*, Vol 6, No: 1, 2025, hlm. 728

³⁹ Suwanti Sari, dkk, "Pelatihan Persiapan Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum Penempatan hingga Pemulangan di Desa Nanggalamekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat", *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, Vol 1, No: 2, 2020, hlm. 148

budaya juga menghambat kemampuan untuk beradaptasi dan berkomunikasi secara efektif. Keenam, Minimnya literasi *entrepreneur* dan keuangan. Tidak sedikit PMI yang setelah bekerja bertahun-tahun di luar negeri pulang tanpa tabungan atau aset. Hal ini bukan semata karena gaji kecil, tetapi karena rendahnya kemampuan mengelola keuangan dan kurangnya wawasan kewirausahaan.⁴⁰ Literasi keuangan yang rendah membuat mereka rentan terhadap konsumtifisme, penipuan investasi, dan kegagalan dalam membangun usaha setelah pulang.

Urgensi Transformasi Kurikulum Berbasis *Artificial Intelligence* Bagi Siswa di Daerah Kantong Pekerja Migran Indonesia Menuju *Zero Skill Mismatch*

Berdasarkan pada faktor-faktor permasalahan yang dijelaskan di atas, ke enam persoalan tersebut dapat diantisipasi melalui penguatan keterampilan dan pemahaman melalui kurikulum sekolah yang dimulai sejak dini di sekolah menengah keatas. Khususnya dalam penguatan kemahiran berbahasa asing yang disesuaikan dengan negara tujuan penempatan tidak bisa hanya dengan hitungan minggu atau bulan. oleh karenanya perlu dilakukan penguatan keterampilan menggunakan Bahasa asing itu jauh jauh hari ketika CPMI masih duduk di bangku sekolah dengan melakukan transformasi kurikulum plus berbasis *artificial intelligence* yang mendukung siswa CPMI mengenal bahasa asing yang akan digunakannya pada saat nanti mereka bekerja di luar negeri. Inovasi ini dimaksudkan penulis hanya diberlakukan di daerah-daerah kantong PMI di Indonesia yang selama ini mayoritas setelah siswa itu lulus dari SMA tidak melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi tetapi memilih bekerja ke luar negeri sebagai PMI. Transformasi kurikulum bukan hanya soal perubahan isi ajar, tetapi juga transformasi paradigma, dari pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berbasis proyek, teknologi, dan penguatan keterampilan⁴¹

Dengan adanya transformasi kurikulum yang adaptif dan kontekstual, diharapkan semua siswa khususnya yang berniat menjadi PMI dapat mengikuti sistem pendidikan secara adil dan setara, serta memperoleh keterampilan yang memadai untuk berpartisipasi secara produktif di dunia kerja. Ini tidak hanya akan memperkuat daya saing mereka secara individu, tetapi juga memperkecil ketimpangan sosial dan mengurangi ketergantungan jangka panjang pada jalur migrasi kerja yang tidak aman. Urgensi ini juga diperkuat oleh amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya dalam Pasal 6 dan 13 yang menegaskan pentingnya perlindungan PMI pada masa pra-penempatan melalui pelatihan dan sertifikasi. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan PMI harus dimulai sejak dini melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses informasi yang layak.⁴² Artinya, transformasi kurikulum plus di sekolah menengah bukan hanya kebutuhan pendidikan, melainkan juga bagian dari kebijakan negara untuk melindungi warganya dari resiko migrasi yang tidak aman dan tidak layak.

⁴⁰ Dian Ferriswara, dkk, "Pengelolaan Keuangan Digital bagi Pelaku Usaha Mantan Pekerja Migran di Kota Probolinggo", JPMP, Vol 1, No: 2, 2022, hlm.82

⁴¹ Dede Kurnia Adiputra, S.Pd, M.Pd, dkk, *Transformasi Pembelajaran Abad 21*, Jawa Barat, Goresan Pena, 2016, hlm. 7.

⁴² Agusmidah, Asri WIjayanti, dan Fithriatus Shalihah, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan UU No 18 Tahun 2017*, (Medan: ALhayat, 2020), hlm 74-77.

Transformasi kurikulum berbasis pada AI menjadi topik penting di era digital saat ini. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta catatan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan global yang semakin kompleks, penerapan AI dalam institusi pendidikan dapat menciptakan kurikulum yang lebih adaptif, personal dan relevan dengan kebutuhan zaman.⁴³ AI dapat membantu mendesain pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, serta mempersiapkan mereka menghadapi dunia pasar kerja global yang dinamis dan berbasis teknologi.

Penguatan keterampilan dari hulu, menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai persoalan yang kerap dihadapi oleh PMI seperti kurangnya kompetensi teknis, keterbatasan kemampuan berkomunikasi dan berbahasa, dan pemahaman terhadap hak-hak tenaga kerja. Dengan kurikulum yang berbasis AI, sekolah dapat memetakan potensi dan kebutuhan siswa secara lebih akurat sesuai minat penempatan, memberikan pelatihan keterampilan dan membuka akses terhadap sumber belajar global.⁴⁴

Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan sinergi antar *stakeholder*, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, dan sekolah-sekolah di wilayah kantong PMI. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui kesepakatan bersama untuk mengembangkan dan menerapkan Kurikulum ini tidak hanya mengacu pada standar pendidikan nasional, tetapi juga memperkuat penguasaan keterampilan yang relevan dan aplikatif dalam konteks dunia kerja luar negeri. Siswa dapat mengakses materi yang sesuai dengan minat dan potensi penempatan kerja mereka, seperti pelatihan bahasa asing, keterampilan vokasional, hingga simulasi situasi kerja lintas budaya. Dengan demikian, kurikulum plus ini menjadi jembatan yang menghubungkan pendidikan formal dengan kebutuhan lapangan pasar kerja global secara lebih konkret dan strategis.

Salah satu implementasi kurikulum plus adalah melalui pengajaran bahasa asing secara terstruktur dan adaptif dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis AI. AI dapat digunakan untuk memberikan umpan balik instan, personalisasi materi berdasarkan kemampuan siswa, serta menciptakan simulasi komunikasi dalam konteks kehidupan kerja di luar negeri.⁴⁵ Sebagai bagian dari kurikulum plus tersebut, dikembangkan pula modul pembelajaran tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa CPMI, termasuk aspek keterampilan vokasional, pemahaman budaya masyarakat di negara tujuan, dan hak-hak perlindungan tenaga kerja. Modul ini disusun bersama dan disetujui oleh ketiga pihak (Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, dan sekolah) serta ditetapkan sebagai bagian resmi dari kurikulum di sekolah-sekolah wilayah kantong PMI. Dengan demikian, lulusan sekolah tidak

⁴³ Agustina Purnami Setiawi, dkk, "Dampak Artificial Intelligence Dalam Pembelajaran Sekolah Menengah Atas", *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, Vol 5, No: 1, 2024, hlm. 682.

⁴⁴ Ibid, hlm 683

⁴⁵ Samsuar A. Rani, dkk, "Inovasi Blended Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab: Tantangan Dan Peluang Di Era Society 5.0", *Lisanuna*, Vol 14, No: 2, 2024, hlm. 269.

hanya mendapatkan ijazah formal, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan pengetahuan kontekstual yang menjadi dasar dan bekal penting sebelum memasuki pasar kerja global. Kurikulum berbasis AI ini membuka jalan bagi pendidikan yang lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan riil dunia kerja, dan menjadi bagian integral dari perlindungan dini bagi para CPML.

Sebagai bagian integral dari kurikulum plus ini, sekolah secara aktif melakukan klasifikasi terhadap siswa yang memiliki minat tujuan bekerja ke luar negeri, berdasarkan jenis pekerjaan maupun negara tujuan yang diminati. Misalnya, siswa yang berminat bekerja di sektor informal di Hongkong, maka siswa akan diarahkan pada penguatan bahasa kanton (Bahasa *Guangfu* atau *Guangdong*) serta pelatihan terkait budaya kerja dan standar pelayanan di negara tersebut. Proses klasifikasi ini menjadi dasar dalam penyusunan jadwal pembelajaran khusus, di mana siswa wajib mengikuti mata pelajaran tambahan atau kegiatan ekstrakurikuler wajib yang sudah disesuaikan dengan tujuan masing-masing.

Dalam implementasinya, peran guru lebih difokuskan pada fungsi pendampingan dan asesmen. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengajaran, melainkan mendampingi proses belajar, melakukan evaluasi awal (*pre-test*) dan akhir (*post-test*) untuk menilai perkembangan kompetensi siswa, serta memberikan bimbingan saat siswa mengakses materi berbasis AI. Agar proses belajar berjalan efektif, Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan bekerja sama dengan sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung transformasi kurikulum plus berbasis AI. Kolaborasi tiga pihak ini menjadi bagian penting dalam mengimplementasikan kurikulum plus yang adaptif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja global, khususnya bagi siswa CPML. Dalam mendukung program ini, berbagai aplikasi pembelajaran berbasis AI dapat diintegrasikan sebagai bagian dari penguatan keterampilan siswa. Aplikasi-aplikasi ini, meskipun bersifat berbayar, difasilitasi oleh ketiga stakeholder (Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, dan sekolah) melalui skema subsidi, sehingga dapat diakses secara gratis oleh para siswa.

Beberapa contoh aplikasi berbasis AI yang dapat digunakan dalam program keterampilan bahasa diantaranya meliputi *dualingo*, *talkpai.ai*, *lingQ*, *quazel*, *mondly by Pearson* serta platform lainnya yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan keterampilan linguistik siswa secara mandiri dan adaptif, tetapi juga memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan dan kecepatan masing-masing individu. Lebih jauh, lembaga pendidikan dan dinas terkait juga dapat mengembangkan layanan berbasis web lokal yang dilengkapi AI untuk kepentingan pelatihan dan asesmen, yang dikelola secara kolaboratif antarinstansi.

Program ini dijalankan secara terstruktur dalam dua semester, yakni pada semester 2 kelas XI dan semester 1 kelas XII. Pada semester 2 kelas XII, fokus pembelajaran diarahkan sepenuhnya kepada persiapan ujian kelulusan. Selama dua semester pelaksanaan program, siswa yang masuk dalam klasifikasi peserta program akan mengikuti pelatihan intensif, dan di akhir periode akan menjalani tes kompetensi berbasis AI untuk memperoleh sertifikasi keterampilan dasar. Dalam proses asesmen, guru berperan sebagai pendamping teknis sekaligus pengawas, menjaga integritas dan objektivitas pelaksanaan ujian. Hasil dari tes tersebut dituangkan dalam bentuk sertifikat yang bukan hanya menjadi bukti penguasaan kompetensi, tetapi juga berfungsi sebagai surat keterangan pendamping ijazah resmi dari

sekolah. Sertifikat ini diperkuat validitasnya oleh sistem digital dan basis data pendidikan yang terintegrasi, serta menjadi nilai tambah dalam portofolio lulusan ketika mendaftarkan diri sebagai CPMI. Melalui skema ini, kurikulum plus tidak hanya memberikan keunggulan kompetitif, tetapi juga menjadi urgensi strategis dalam menghadirkan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan proaktif dalam melindungi masa depan siswa sejak dari bangku sekolah.

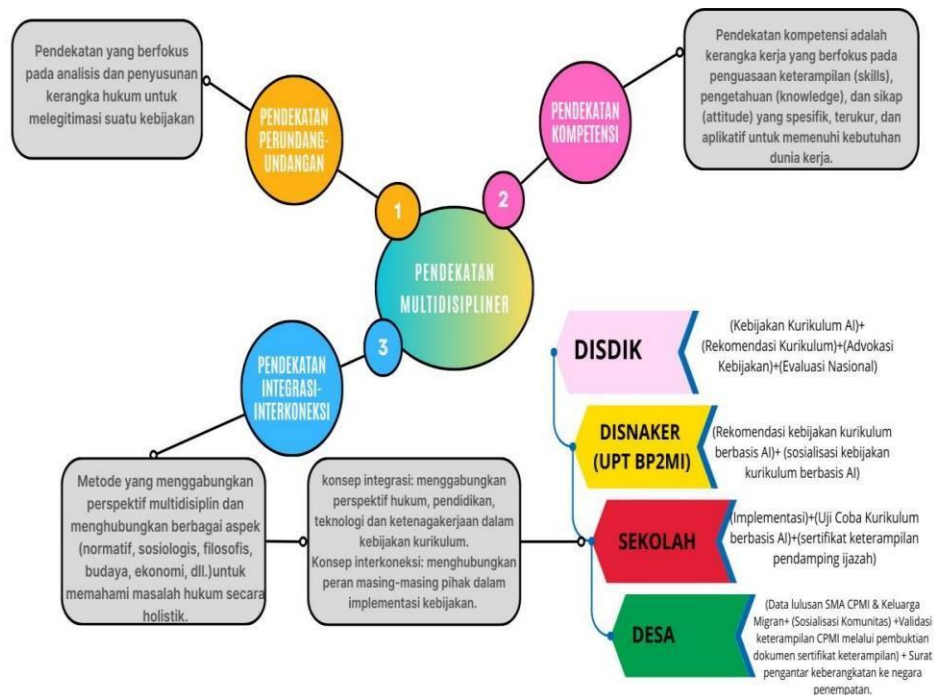
Sebagai bentuk sinergi antar pemangku kepentingan, sertifikat keterampilan dasar yang diperoleh dari program ini akan dijadikan salah satu syarat administratif yang wajib dipenuhi oleh CPMI untuk mendapatkan surat rekomendasi atau surat keterangan dari pemerintah desa. Artinya, baik untuk keperluan pendaftaran mandiri maupun melalui pihak ketiga seperti Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), surat dari desa tidak akan dapat diterbitkan tanpa adanya sertifikasi ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa setiap CPMI yang akan diberangkatkan telah memenuhi standar minimal keterampilan yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan. Khususnya bagi CPMI yang membidik pasar kerja pada sektor formal. Oleh karena itu, selain keterlibatan Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan, kolaborasi aktif dengan pemerintah desa dan P3MI menjadi kunci keberhasilan sistem ini. Pemerintah desa berperan sebagai garda terdepan dalam validasi sosial dan administratif keberangkatan CPMI, sedangkan P3MI berfungsi sebagai fasilitator teknis yang juga bertanggung jawab terhadap kesiapan CPMI dari sisi keterampilan, pemahaman hukum dan culture Masyarakat di negara penempatan serta etika kerja.

Penting untuk dicatat bahwa pelatihan keterampilan dasar ini merupakan upaya "penguatan dari hulu" dalam ekosistem perlindungan pekerja migran. Meski secara regulasi, diklat pra-penempatan bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, namun dengan adanya program keterampilan berbasis sekolah, diklat tersebut akan berfungsi sebagai penyegaran dan pementapan. CPMI yang telah mendapatkan penguatan keterampilan sejak duduk di bangku sekolah, akan memiliki kesiapan yang lebih matang untuk mengikuti pelatihan lanjutan dan lebih cepat lolos dalam sertifikasi resmi yang menjadi syarat pemberangkatan.

Gambar 3.

Skema Kebijakan Kurikulum Plus Berbasis *Artificial Intelligence*

Bagi Siswa Di Daerah Kantong Pekerja Migran Indonesia



Gambar di atas merupakan skema alur transformasi dibentuknya kebijakan kurikulum plus yang menunjang penguatan skill berbahasa asing bagi siswa CPMI di daerah kantong PMI dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Inovasi ini merupakan terobosan yang urgen untuk dilakukan sebagai salah satu bentuk Solusi mengurangi pengiriman PMI ke luar negeri dalam kondisi skill-mismatch sebagaimana sebab-sebab yang telah diuraikan oleh penulis dalam pembahasan di atas.

Sehingga perintah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang tertera pada Pasal 6 dan Pasal 13 yang merupakan aturan pelindungan terhadap PMI pada masa pra penempatan yang hingga saat ini belum berjalan efektif karena berbagai faktor, khususnya dalam penguatan keterampilan berbahasa asing dapat ditempuh dengan cara menyiapkannya dari CPMI tersebut masih berstatus siswa di sekolah menengah atas. Tentunya adalah para siswa yang berasal dari daerah kantong PMI di Indonesia yang setelah lulus dipastikan mereka berangkat bekerja ke luar negeri.

Setelah kurikulum itu diberlakukan, pada saat mereka kelas XI semester 2 pihak sekolah sudah mulai melakukan inventarisasi kepada para siswa terkait peminatan sektor pekerjaan yang dipilih dan negara tujuan yang dipilih. Dengan demikian sekolah sudah memiliki klasifikasi jenis pekerjaan yang dipilih dan negara yang dituju oleh siswa setelah mereka lulus. Hal ini memudahkan pihak sekolah menentukan kelas- kelas pelajaran bahasa asing sesuai kebutuhan para siswa. Dengan pembelajaran berbasis AI sekolah tidak perlu kesulitan menyediakan sumber daya manusia atau guru yang memiliki kemampuan berbagai macam Bahasa asing yang dibutuhkan tersebut, karena Lokasi wilayah kantong PMI tersebar di berbagai daerah di Indonesia tidak hanya di perkotaan namun justru lebih banyak di pedesaan. Pemerintah terkait cukup memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan yakni kebijakan kurikulum itu sendiri, akses internet yang memadai dan aplikasi pembelajaran bahasa asing yang mudah diterima siswa secara gratis. Indikator keberhasilan dari penerapan kurikulum ini dapat dilihat dari *pre-test* dan *post-test* yang diberlakukan.

Penguatan pemberian pelatihan sebagai bentuk dukungan terhadap perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada masa pra-penempatan menjadi salah satu alternatif yang bisa ditempuh untuk penyiapan sumber daya manusia dengan keterampilan yang memadai sesuai tujuan Asta Cita pemerintahan yakni meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan memperkuat pengembangan SMA dan juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's).

Penutup

Kesenjangan dalam pelindungan pekerja migran Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 1) Problem *mindset*, 2) Kendala bahasa dan komunikasi, 3) Mentalitas, 4) Minimnya pemahaman hukum ketenagakerjaan, 5) Minimnya informasi budaya/*culture* negara penempatan, dan 6) Minimnya literasi keuangan dan *entrepreneur*. Salah satu solusi yang bisa dilakukan dalam meminimalisir faktor kendala Bahasa dan komunikasi adalah dengan melakukan transformasi kurikulum berbasis *artificial intelligence* bagi siswa calon pekerja migran Indonesia di daerah kantong PMI untuk mempersiapkan pengiriman ke negara penempatan dalam kondisi *zero skill-mismatch*.

Urgensi transformasi kurikulum berbasis *artificial intelligence* bagi siswa calon pekerja migran Indonesia di daerah kantong PMI merupakan upaya sedini mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan pihak sekolah dalam Upaya mengurangi pengiriman PMI ke luar negeri tanpa skill yang memadai (*skill-mismatch*) yang berdampak pada problem hukum dan sosial di negara penempatan. Harapannya transformasi kurikulum berbasis AI ini dapat dipertimbangkan untuk menjadi kebijakan oleh pemerintah terkait di daerah baik Dinas Pendidikan, UPT BP2MI, sekolah dan desa di daerah kantong PMI. Karena sebagian persoalan yang terjadi pada masa penempatan bersumber dari hulu.

Dalam upaya penguatan *skill* bagi siswa calon pekerja migran indonesia asal daerah kantong penulis menyarankan agar ada persamaan persepsi antara pemetintah terkait dengan pihak sekolah menengah atas. Penwraoan kurikukum berbasis AI untuk kondisi saat ini sangat relevan digunakan sebab lebih efisien baik dalam pembiayaan maupun beragamnya fasilitas yang disediakan. Dengan biaya yang murah tanpa harus menyediakan guru-guru yang mahir berbahasa asing berbagai negara yang menjadi tujuan bekerja siswa calon pekerja migran, sekolah sudah memlunyai owran dalam upaya meningkatkan keterampilan berbahasa asing bagi siswanya untuk memperkecil angka *skill mismatch* dalam pengiriman pekerja migran ke luar negeri.

Daftar Pustaka

- Absori, dkk "Penyuluhan tentang Problematika dan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Hongkong," *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Adiputra, Dede Kurnia, dkk, *Transformasi Pembelajaran Abad 21*, Jawa Barat, Goresan Pena, 2016.
- Afriani, Royani, dkk, "Penguatan Keterampilan Bahasa Inggris Pekerja Migran Indonesia (PMI) Cirebon", *Equalita*, Vol 2, No: 1, 2020.

- Agusmidah, Asri Wijayanti, Fithriatus Shalihah, Dios Aristo Lumbangaol, & Reinaldo “ The financial protection of Indonesian migrant workers and its economic consequences”, *Economic Annals-XXI*, Vol 196 Issue (3-4),2022.
- Agusmidah, Asri Wijayanti, dan Fithriatus Shalihah, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan UUU No 18 Tahun 2017*”, Medan: Ahayat, 2020
- Anggara, Reddy, dkk. “Understanding the motivations of being Indonesian migrant workers,” *Cogent Social Sciences*, Vol. 10 No. 1, 2024.
- Ardhana, Argi Yhudin Avri, dkk, “Analisis Ketidaksesuaian antara Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja di Indonesia”, *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol 3, No: 4, 2025.
- Badan Pusat Statistik, “*Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024*,” Badan Pusat Statistik, Vol. 11 No 83, 2024.
- Badan Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*, Badan Pusat Statistik, 2023.
- Badan Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia*, vol. 46, no. 2. 2024
- Badan Pusat Statistik, *Cerita Data Statistik Untuk Indonesia “ Pekerja Migran Indonesia”*, Vol 1 No 4, 2024.
- Bimantara, Ade Arya dkk “Dampak dari Kecerdasan Buatan yang Mulai Menyebar dalam Segala Bidang Terutama dalam Bidang Pendidikan Terhadap Pencapaian Pelajar,” *Abdi Jurnal* vol. 5, no. 1,2024.
- Budi, Imanuel Setyo dkk. “Peran Dan Tantangan Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Inovasi Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Indonesia Masa Depan,” *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 4 No. 4, 2024.
- BP2MI, *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Tahun 2022*, Pusat Data dan Informasi, 2022.
- Cindiana, Merlin, dkk. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Anak Pekerja Migran Indonesia untuk Bekerja ke Luar Negeri di Kabupaten Cilacap,” *Journal Economic Business*, Vol 6 No 1, 2022.
- Data Indonesia id, *Kumpulan Data Pekerja Migran Indonesia pada 2024*, *DataIndonesia*, 2024.
- Dios Aristo Lumbangaol, Agusmidah, and Fithriatus Shalihah, “Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pembebasan Biaya Penempatan,” *Prosiding Konferensi Ke-4 Perkumpulan Pengajar dan Prakt. Hkum Ketenagakerjaan Indonesia.*, Vol. 4, pp. 36-57, 2022.
- Erawati, Deina Asri, dkk, “Dampak Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Desa Lepak, Kabupaten Lombok Timur”, *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, Vol 1, No: 2, 2023.
- Fathiah,dkk. “Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Negara Penempatan Malaysia untuk Peningkatan Kapasitas dan Persiapan Kemandirian” *Jurnal Kreasi*, Vol. 3 No 3, 2023.
- Fathullah, Kholidazia El Hamzah, dkk, “Modus Dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Ilegal Di Kabupaten Lumajang”, *Justness*, Vol 3, No: 2, 2023.
- Fikriansyah, Zulfan, & Aan Julia, “Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus: di Desa Bongas Kecamatan Bogas Kabupaten Indramayu),” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2023.
- Fitriani, Desi dkk, “Strategi Peningkatan Kompetensi Calon pekerja mIgran Indonesia”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol 49 No 2, 2024.

- Ferriswara, Dian dkk, "Pengelolaan Keuangan Digital bagi Pelaku Usaha Mantan Pekerja Migran di Kota Probolinggo", *JPMP*, Vol 1, No: 2, 2022.
- Halizah, Sarah Nur. "Kesenjangan Kurikulum Smk Dengan Kebutuhan Industri," *Adiba J. Educ.*, vol. 4, no. 2, pp. 227-233, 2024.
- Hamdi, Saipul dkk. "Strategi Survival Pekerja Migran di Masa Pandemi Covid-19 di Suralaga, Lombok Timur," *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora.*, vol. 8, no. 2, 2022.
- Hariani, Septi and Najamudin Khairur Rijal, "Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan Zero Unprocedural PMI," *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Vol 3 No 1, 2023.
- Hidayat, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2021.
- Huynh, Hai Hien and Duc Hong Vo, "The Effects of Migration on Unemployment: New Evidence from the Asian Countries," *Sustainability* Vol. 15, No. 14, 2023.
- Karyadi, Bambang. "Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Mendukung Pembelajaran Mandiri," *Educate Jurnal Teknologi Pendidikan.*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Khairina Rohmatin, dkk. "Komparasi Pemenuhan HAM Bagi PMI Asal Pulau Lombok di Tiga Negara Tujuan Utama (Arab Saudi, Malaysia dan Singapura)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2, pp. 239-256, 2024.
- Kristianti, Tri. "Implementasi Artificial Intelligence (Ai) Dalam Dunia Pendidikan Di Era Society 5.0," *Prosiding. Temu Ilmiah Nasional Guru XV*, Vol. 15 No. 1, 2023.
- Nashrullah, Mochamad, dkk, "Transformasi Digital Dalam Pendidikan Indonesia: Analisis Kebijakan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pembelajaran", *Mudir*, Vol 7 No. 1, 2025.
- Nisa, Azizah Kholifatul dkk. "Hubungan Usia, Tingkat Pendidikan & Status Perkawinan dengan Partisipasi Perempuan Menjadi Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong di Kecamatan Sukun Kota Malang," *Jurnal Ketenagakerjaan*, vol. 18, no. 3, 2023.
- Nevia, Grace & Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa, "Strategies For Preventing Exploitation of Non-Procedural Indonesian Migrant Workers (PMI) Based On Routine Activity Theory", Vol. 4, No. 4, May 2024.
- Nurachmat, Ridwandani Azril dkk, "Pengawasan BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dalam Upaya Mewujudkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang Bermartabat", *Lentera: Multidisciplinary Studies*, Vol 3, No: 2, 2025.
- Rahmawati, Ajeng Tiara Bangga, dkk, "Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemberangkatan PMI Di Masa Pandemi)," *Journal of International Relations Diponegoro*, Vol. 9 No 1, 2023.
- Rahmany, Sri, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga", *Iqtishaduna*, Vol 7, No:1, 2018.
- Rizkia, Afifah, & Ria Haryatiningsih, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Kota Besar di Pulau Jawa," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3 No 2, Desember 2023.
- Samsuar A. Rani, dkk, "Inovasi Blended Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab: Tantangan Dan Peluang Di Era Society 5.0", *Lisanuna*, Vol 14, No: 2, 2024.
- Sari, Suwarti dkk, "Pelatihan Persiapan Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum Penempatan hingga Pemulangan di Desa Nanggalamekar, Kecamatan Ciranjang,

- Kabupaten Cianjur, Jawa Barat", *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, Vol 1, No: 2, 2020.
- Sembada, Andhika Djaludkk "Motivasi Calon Pekerja Migran Indonesia Bekerja ke Luar Negeri dan Kontribusinya Bagi Negara Indonesia," *Metta Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 4 No 2, 2024.
- Setiawati, Agustina Purnami, dkk, "Dampak Artificial Intelligence Dalam Pembelajaran Sekolah Menengah Atas", *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, Vol 5, No: 1, 2024.
- Shalihah, Fithriatus & Siti Alviah, "Examining the Role of BPJS Employment Indonesia in Ensuring Social Security for Migrant Workers in HongKong", *JILS (Journal Of Indonesian Legal Studies)*, Vol 8, No 2, 2023.
- Shalihah, Fithriatus & Muhammad Nur, "Human Rights Violation Againsts the Indonesian Migrant Fisheries Crew in Chinese-Flagged Long Xing Vessel", *mahal*, Vol 10, No: 1, 2021.
- Susianita, Resta Ayu and Lilia Pasca Riani, "Pendidikan Sebagai Kunci Utama Dalam Mempersiapkan Generasi Muda Ke Dunia Kerja Di Era Globalisasi," *Prosiding Pendidikan Ekonomi*, 2024.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Martuti, Nana Kariada Tri dkk, "Pojok Curhat" Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan Sebagai Sarana Penguatan Mental di Negara Asing", *Bernas*, Vol 6, No: 1, 2025.
- Novitasari, "Pengambilan Keputusan Perempuan Menjadi Buruh Migran Indonesia (Studi Kasus Di Desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang," *Prosiding Seminar Nasional. Riset Teknologi Terapan*, 2020.
- Ompi, Melisa Marty, "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," dalam *Lex Priv*, Vol. 12 No. 2, 2023.
- Yandri, Lara Indah, and Gerald Pratama Putra, "Strategi dan Kebijakan dalam Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI)," *Menara Ilmu*, Vol. XVII, No. 1, 2023.
- Wijayanto, Hendra, & Samsul Ode, "Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran di Indonesia," *Administratio*, Vol. 10, No. 1, 2020.